

Jakarta, 26 Oktober 2023

**Yang Terhormat,  
Dewan Etik Hakim Konstitusi  
Di  
Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110**

**Perihal : Surat Pernyataan Lampiran Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi**

Dengan Hormat,

Bersama ini Kami hendak menyatakan Lampiran Surat Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Permohonan Uji Materil tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami ajukan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tertanggal 19 Oktober 2023, dengan ini atas nama Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mengajukan daftar alat bukti untuk memperkuat dalil yang diajukan oleh Pelapor sebagai berikut:

<b>Daftar Alat Bukti</b>				
Nomor	Sumber	Keterangan	Nama Bukti	Penjelasan Atas Bukti
Bukti PT-1		Salinan dari asli	Kartu Tanda Penduduk atas nama Julius Ibrani selaku Ketua Pengurus Badan Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM	





**PBHI**  
PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

			Indonesia	
Bukti PT-2		Salinan dari asli	Akta Notaris (Pendirian) Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia	Bukti ini menunjukkan bahwasanya Pelapor merupakan badan hukum berbentuk perkumpulan yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) serta pendirian Pelapor telah disahkan dan diakui oleh Pemerintah.
Bukti PT-3		Salinan dari asli	Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor AHU-0000147.AH.01.08. Tahun 2021 tertanggal 27 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia	
Bukti PT-4		Cetakan salinan putusan	Putusan 2/PUU-VII/2009 Tanggal 5 Mei 2009	Bukti ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengakui kedudukan hukum (legal standing) Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia sebagai badan hukum bentuk perkumpulan yang berhak mengajukan permohonan uji materiil sebagai Pemohon
Bukti PT-5		Cetakan salinan putusan	Putusan 140/PUU-VII/2009 Tanggal 19 April 2010	
Bukti PT-6		Cetakan salinan putusan	Putusan 32/PUU-VIII/2010 Tanggal 4 Juni 2012	
Bukti PT-7		Cetakan salinan putusan	Putusan 27/PUU-XIX/2021 Tanggal 31 Oktober 2022	
Bukti PT-8		Salinan dari asli	Tanda Terima No. 30 -16/PUU/PAN.MK/A P3	Bukti ini menunjukkan bahwa Mahkamah





**PBHI**

PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

				Konstitusi mengakui kedudukan hukum (legal standing) Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia sebagai badan hukum bentuk perkumpulan yang berhak mengajukan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung
Bukti PT-9		Cetakan undangan	Undangan Nomor 05/PANSEL-MK/XII/2014	Bukti ini menunjukkan keterlibatan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia dalam Tim Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh presiden
Bukti PT-10	<a href="https://kumparan.com/kumparannya/pbhi-laporan-arief-hidayat-ke-dewan-etik-mk">https://kumparan.com/kumparannya/pbhi-laporan-arief-hidayat-ke-dewan-etik-mk</a>	Cetakan website	Berita dengan judul: PBHI Laporkan Arief Hidayat ke Dewan Etik MK	Bukti ini menunjukkan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia sebagai Pelapor Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Institusi atas nama Arief Hidayat
Bukti PT-11	<a href="https://youtu.be/zxqqNiMZwoA?si=oG-fsgvnKjkF3iFg">https://youtu.be/zxqqNiMZwoA?si=oG-fsgvnKjkF3iFg</a>		Video Youtube dari akun KompasTV dengan judul: Apa Maksud Ketua MK Singgung soal 'Pemimpin Muda' saat Bahas Gugatan Usia Capres-Cawapres?	Bukti ini menunjukkan kutipan komentar Anwar Usman yang menyinggung soal batas usia capres-cawapres dalam kuliah Umum di Kampus Semarang





# PBHI

PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA

Bukti PT-12			Salinan halaman 113 Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Arief Hidayat	Bukti ini menunjukkan <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Konstitusi Arief Hidayat terkait Konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, terhadap ketidakhadiran Ketua MK Anwar Usman
Bukti PT-13			Salinan halaman 114-115 Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023	Bukti ini menunjukkan <i>Dissenting Opinion</i> Hakim Konstitusi Arief Hidayat terkait status pencabutan Permohonan
Bukti PT-14			Salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Acara Konfirmasi Permohonan Pemohon	
Bukti PT-15			Salinan halaman 98 Putusan Perkara No. 90/PUU-XXI/2023	Bukti ini menunjukkan adanya penambahan dan/atau perubahan Frasa “ <i>atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah</i> ” dalam amar putusan yang berbeda dari petitum pemohon



Demikian Pernyataan ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Oktober 2023

Hormat Kami,

**PELAPOR**

**Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI)**



The logo of the Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) is displayed. It features a blue square icon with a white scale of justice, followed by the acronym 'PBHI' in large blue letters. Below the acronym, the full name of the organization is written in smaller blue text: 'PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA'. A large, stylized blue handwritten signature is overlaid on the logo.

**Julius Ibrani**

***Ketua Badan Pengurus Nasional***